

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. (Bandung: PT Alumni, 2014).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- C.Djemabut Blaang, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, (Jakarta: Buku Seru, 2013).
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982).

- Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018).
- H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2014).
- Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke 12*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 2020).
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, (Bandung: Alumni, 1999).
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Menindjau Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : CV.Rajawali, 1985).
- Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2012).

Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Wahid Abdul,dkk, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022).

Wntjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indah,1977).

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001).

B. Jurnal.

Alusianto Hamonangan, Mhd. Taufiqurrahman, & Rosma Mediana Pasaribu, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2,(2021).

Arivan Halim, “Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling”, *Jurnal Hukum Universitas Krisnadwipayana*. Vol. 1, No. 2, (2022).

Clara Vania dan Gunawan Djajaputra, “Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum Adigama* (September 2019).

Dana Putri Ristiana, “Kedudukan Hukum Kuasa Sebagai Bagian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Hal Terjadi Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 261K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, (Universitas Indonesia, Depok, 2018).

Dedy Tri Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 4, No. 1,(2016).

Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, Dan Abstrak”, *Delta-Pi Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5 No. 1 (2016).

Edwin Prasetyo dan Djuwityastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Properti Atas Kepailitan Perusahaan Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Jurnal Private Law Vol. VII No. 1* (Januari-Juni 2019).

Fauziah Aprilia Nusi, “Kajian Yuridis Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960” *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 6, No. 9 (2018).

Fredrik Mayore Saranaung, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”. *Lex Crimen*, Vol. VI No. 1 (2017).

Fifian Leliana Dan Anis Mashdurohatun, “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus Pt. Wahana Wijaya Lestari Reality Dengan Yo Swie Tjin)”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 (2017).

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01 (2019).

Putri Wijayanti, Ana Silviana, Sri Wahyu Ananingsih, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Yang Sedang Dibebeani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 416/Pdt/G/2015/PN.Smg)”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 6, No. 2, (2017).

Rahmat Ramadhani, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Kajian Hukum. Vol. 2, No. 1*, (2022).

Rahmawati Yuris Adhia, dkk. “Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga Internasional Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus- Pailit/2015)”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Sem Sanjaya, “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/PDT/2020)”, *Jurnal Indonesian Notary. Vol. 3, No. 4*, (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.